



**PROGRES KEMAJUAN KOMUNITAS MISKIN DI PERKOTAAN : URGENSI  
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT**

Andrian Anwar L Nata<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu

E-mail: [andrian20164@gmail.com](mailto:andrian20164@gmail.com)

**Abstrct**

*This article attempts to contribute to practical considerations of community participation in development activities in poor urban communities. Therefore, comprehensive intervention is needed and involves various stakeholders from the authorities as well as various stakeholders such as volunteer organizations, companies, universities and the community. Action research is applied research that uses knowledge as a form of power and eliminates the boundaries between research and social action. Assistance to the poor is an effort to alleviate poverty because the recipient had a business before receiving assistance and did not meet the average criteria for assistance. This is a job that does not take into account the professionalism of the work. For the urban poor community empowerment model, there are 4 development stages, namely the potential development stage, the social accumulation stage (employment potential), the social participation stage and the special stage. Community action as a local force can create a model of community empowerment that relies on the principles of ecology and social justice and upholds human rights values. The idea is that implementing a model of strengthening local poor communities in urban areas can change the nature of the social development model, rather than developing society from the economic sector, but must be accompanied by an understanding of the potential of the community, the potential and potential that the community has, the greater their hopes and building a better society..*

**Article Info**

**Article History**

Received : 12 – 09– 2024,

Revised : 15 – 11– 2024,

Accepted : 18 – 11– 2024

**Keywords:**

*Poor Communities in Urban Areas, Community Participation*

**INTRODUCTION**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan cara pandang yang berbeda dengan pendekatan yang menekankan pada agenda pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu alternatif model pembangunan yang kali ini menekankan pendekatan *top-down*. Pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dinilai sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Sebab, pendekatan *top-down* lebih mencerminkan perspektif pengambil keputusan teratas dalam menentukan jenis pembangunan yang akan terjadi. Tentu saja model *top-down* seperti ini menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, karena produk pembangunan tidak dapat merespon dengan baik permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, gerakan pembangunan alternatif muncul sebagai bentuk kritik terhadap model pembangunan yang bersifat *top-down* saat ini. Program pembangunan ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dengan menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan pembangunan. Konsep-konsep pembangunan seperti partisipasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, keuangan partisipatif, dan lain-lain mulai populer di kalangan aktivis pembangunan. Seiring berjalannya waktu, tujuan sosialisasi pun berubah. Para pendukung pembangunan semakin menyadari bahwa keterbatasan sumber daya yang

tersedia untuk melaksanakan pembangunan dapat diatasi, sehingga menciptakan peluang bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembangunan.

Artikel ini mencoba memberikan kontribusi pada pertimbangan praktis partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di masyarakat. Pemimpin masyarakat dari berbagai generasi dapat menggunakan pemikiran praktis ini untuk membangun rasa saling percaya dengan anggota masyarakat untuk mencapai pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menanggapi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting. Partisipasi masyarakat mengacu pada proses dimana masyarakat lokal berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada saat yang sama, pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas, otonomi, dan kontrol masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi mereka di masa depan.

Menanggapi tantangan-tantangan ini, pendekatan yang berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sangatlah penting. Partisipasi masyarakat mengacu pada cara masyarakat lokal berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proyek pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pada saat yang sama, pemberdayaan masyarakat berfokus pada upaya meningkatkan kapasitas, otonomi, dan kontrol masyarakat atas sumber daya dan keputusan yang akan mempengaruhi mereka di masa depan. Komunitas lingkungan memainkan peran penting dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, mereka seringkali rentan terhadap perubahan lingkungan dan sosial yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam konsep, strategi dan praktik terbaik dalam inklusi dan pemberdayaan sosial dengan fokus pada komunitas lingkungan. Dengan memahami kekuatan dan kebutuhan daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang efektif kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Tingginya GAP pembangunan antara kota dan desa menjadi salah satu penyebab tingginya urbanisasi. Berdasarkan data dari BPS, wilayah seperti DKI Jakarta dan juga Jawa Barat menjadi salah satu tujuan utama urbanisasi. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2023, di Jakarta jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 10.467.630 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 15.804 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut disajikan tabel proyeksi jumlah penduduk perkotaan tingkat nasional.

Negara	Tahun					
	2035	2030	2025	2020	2015	2010
Indonesia	66.6	63.4	60.0	56.7	53.3	49.8

Sumber: Badan Pusat Statistik. 2024.

Salah satu masalah terbesar di perkotaan adalah kemiskinan. Menurut Bank Dunia, karakteristik kemiskinan perkotaan di Indonesia, termasuk kepemilikan tanah dan akses terhadap tanah keras dan miskin, ada dua, dan kepemilikan tanah sangat berbahaya. Meskipun terdapat sistem hukum, namun tingkat pendidikan keluarga sangat rendah, keluarga sangat bergantung pada penghasilan, kondisi lingkungan yang buruk sehingga menimbulkan berbagai penyakit dan sangat sedikit akses terhadap kesehatan, kondisi kerja yang buruk dan tingginya angka pengangguran. akses terhadap fasilitas dasar. Kota ini mempunyai fasilitas yang sangat sedikit.

Permasalahan yang timbul akibat padatnya bangunan di perkotaan sangatlah sulit terutama pada bangunan-bangunan umum dan apartemen. Meskipun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan di negara-negara berkembang akan menurun antara tahun 2010 (39%) dan 2024 (30%), angka ini kemungkinan akan terus meningkat, dan tantangan hidup di negara-negara rentan masih menjadi penyebab kemiskinan di dunia. Menghadapi tantangan tersulit dalam hidup di perkotaan, termasuk ketimpangan pendapatan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan tingginya biaya pendidikan.

Populasi yang berlebihan berdampak negatif pada anak-anak. Salah satu akibat dari lingkungan yang tidak layak huni bagi anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di rumah yang penuh sesak rentan terhadap segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, dan verbal. Kekerasan terhadap anak ini berarti hilangnya hak anak untuk hidup, termasuk hak atas pendidikan, karena putus sekolah.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di perkotaan sangat sulit dan terutama merugikan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pihak berwenang serta berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi relawan, perusahaan, universitas, dan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu masyarakat melalui partisipasi dan prakarsa masyarakat.

## **METHOD**

Penelitian tindakan merupakan penelitian terapan yang menggunakan pengetahuan sebagai bentuk kekuatan dan menghilangkan batasan antara penelitian dan tindakan sosial. Ciri-ciri umum penelitian tindakan adalah: partisipasi aktif subjek penelitian dalam proses eksplorasi, penelitian yang memadukan penelitian konvensional dan pengetahuan umum, penelitian yang fokus pada pemberdayaan, dan keterlibatan politik secara langsung aktivisme tumbuh dari partisipasi dalam isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Penelitian tindakan ini dilakukan dalam tiga *fase* yaitu lihat, berpikir, dan bertindak. Selama *fase* pertimbangan, peneliti bekerja dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, sumber daya, dan peluang mereka. Untuk memperoleh informasi yang beragam tersebut, digunakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, penyebaran kuesioner, dan tinjauan pustaka. Data yang diperoleh dianalisis langkah demi langkah melalui organisasi data, pengolahan data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

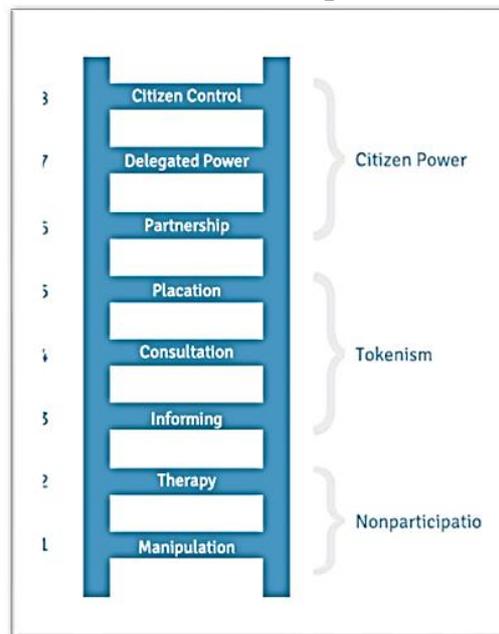
Pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu ciri masyarakat adalah banyak kelompok yang tidak hidup bersama dengan baik dan saling bersaing, tidak semua warga merasa menjadi satu. Di sisi lain, masyarakat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dibangunnya rumah pintar. Masyarakat berharap rumah pintar dapat menjadi ruang kolaboratif bagi anak-anak, remaja, ibu dan ayah. Semua kelompok dapat menggunakan ruang pintar untuk aktivitas hebat sebagai tempat konser, acara, ruang pertemuan, dan tempat yang bagus untuk anak-anak belajar dan bermain. Namun belum ada proyek untuk mengelola dan menggunakan rumah pintar. Dalam urusan kebersihan lainnya, warga tidak peduli dan hanya mengandalkan pihak-pihak tertentu.

Saat ini, banyak aspek masyarakat yang diuntungkan. Pertama, tingkat pendidikan generasi muda di daerah ini sudah baik, khususnya pelajar SMA dan mahasiswa. Kedua, ada banyak koneksi eksternal yang memudahkan proses tersebut. Ketiga, adanya pasar emas baru, dan keempat, karya mahasiswa. Akses terhadap berbagai jenis pengumpulan data akan memperdalam penilaian guna memetakan akar permasalahan. Dalam proses pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan masyarakat. Tujuan pembangunan sosial tercapai bila seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi.

Kajian ini menunjukkan bahwa implementasi rencana pengembangan masyarakat masih kurang baik, hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak berpartisipasi. Hal ini dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok pengabdian dan masyarakat. Hambatan bagi kelompok pengabdian berupa partisipasi sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial tidak ada dan tidak diperlukan

pendekatan strategis. Permasalahan sosial tersebut diantaranya keadaan sosial di kota-kota besar juga situasi, adanya konflik dalam masyarakat, ketidakpedulian para pemimpin masyarakat dalam melihat sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat yang terbatas. Peran tokoh masyarakat (*leader*) tidak dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Motivasi atau motivasinya adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah, kurangnya staf dan kurangnya gagasan sebagai lembaga bersama yang tidak didengar oleh masyarakat.

### Model Partisipasi



Partisipasi masyarakat mengenal adanya perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ada yang mempunyai budaya partisipasi yang kuat, ada pula yang masih kesulitan berpartisipasi dalam masyarakat. Praktik yang baik untuk membangun komunitas termasuk mengadakan pertemuan komunitas secara rutin, menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi dengan komunitas dan melibatkan kelompok sosial yang rentan seperti perempuan dan generasi muda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sosial yaitu faktor-faktor seperti akses terhadap sumber daya, tingkat pendidikan dan struktur kewenangan daerah mempengaruhi tingkat pemberdayaan sosial. Daerah dengan akses terbatas terhadap sumber daya seringkali mempunyai kapasitas penegakan hukum yang terbatas. Tantangan terhadap pemberdayaan masyarakat mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan kesenjangan gender dalam partisipasi dan akses terhadap materi.

Studi ini menyoroti pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun banyak praktik baik telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam mencapai partisipasi yang luas dan berkelanjutan serta memastikan partisipasi sosial, mengingat bahwa di wilayah dimana sarana partisipasi akan meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat dan memperluas inisiatif partisipasi yang berhasil, dan untuk mengidentifikasi peluang baru bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Sementara itu, wacana pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya mengatasi hambatan struktural yang menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, memperkuat dukungan dari otoritas lokal dan mengurangi kesenjangan *gender* dalam perekrutan dan akses terhadap sumber daya. Secara keseluruhan, studi ini memberikan wawasan penting mengenai cara-cara konkrit yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memberdayakan

pembangunan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal dan menggunakan pendekatan kolaboratif, upaya-upaya ini berpotensi menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan adalah fokus pada akar permasalahannya, yakni meningkatkan hasrat dan tenaga masyarakat. Masyarakat dieksplorasi dan didorong pengembangan serta dinamika kemampuannya, serta didorong untuk berminat, sadar dan meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan tidak hanya tumbuh seiring berkembangnya nilai tambah ekonomi, namun juga meningkatkan nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang tidak dapat lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan pada situasi saat ini. Dengan kata lain pemberdayaan adalah penguatan dan kemandirian masyarakat.

Dari definisi dan batasan tersebut, mudah untuk menyimpulkan bahwa hakikat kekuatan sosial adalah kemampuan untuk memperkuat atau mengubah masyarakat dari segi nilai (psikologi), ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan dengan cara: meningkatkan kemampuan (pengetahuan) sikap, keterampilan dan perilaku), memperkuat partisipasi dan tujuan, memperkuat nilai-nilai budaya dan pranata sosial, menggunakan sumber daya lokal dan aktif membantu mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus selalu dilakukan karena hal ini mendesak atau penting:

1. Wawasan terhadap perubahan pemikiran masyarakat, selain perubahan sikap dan keterampilan.
2. Meningkatnya keterlibatan dan kepercayaan masyarakat, memberi dukungan serta legitimasi sosial.
3. Membangun dukungan sosial dan kesetaraan.
4. Kebangkitan kearifan lokal kerjasama dalam masyarakat, yang berakar pada sistem sosial masyarakat.

Memberdayakan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi rasio gini atau ketimpangan upah, dan meningkatkan pendapatan ekonomi melalui pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Provinsi ini merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin yang tinggi, yakni 11,7%, padahal persentase penduduk nasional adalah 9,41%, serta masalah ketimpangan upah antar kelompok sosial, dan indeks gini yang tinggi.

Padahal, selama ini banyak upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengurangi atau mengatasi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan multi kelompok. Pertama kelompok pengentasan kemiskinan yang berbasis pada dukungan sosial sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban kebutuhan hidup masyarakat. Kedua, pengentasan kemiskinan berbasis komunitas dan lokasi. dan kelompok ketiga pengentasan kemiskinan berdasarkan pengembangan usaha mikro dan kecil. Namun, dari berbagai sudut pandang dan kelompok, penurunan angka kemiskinan belum signifikan. Bahkan terkadang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mencari akar permasalahan kemiskinan, melihat permasalahan sebenarnya dari gerakan kemiskinan yang gagal produktif dan sejahtera. Dengan kata lain, kita perlu memahami sifat kemiskinan, akar permasalahannya dan solusi lainnya.

Semua kegiatan ini harus dilakukan bersamaan dengan metode kerja tim anti kejahatan daerah (nangkis). Dengan demikian, model validasi ini berbeda dengan model amal atau model pemberian, namun akan meningkatkan mentalitas dan nilai-nilai masyarakat, sehingga kelompok sasaran harus ditentukan dengan baik dan harus diikuti. Bukan lanjut usia atau lanjut usia karena berbeda dengan program jaring pengaman sosial atau program kebutuhan dasar, meskipun tetap terhubung dengan program itu. Selain itu, karena permasalahan kemiskinan berkaitan dengan rendahnya pendapatan ekonomi, maka cara strategi pemberdayaan adalah dengan meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan wirausaha sosial. Saat ini dimungkinkan untuk bekerjasama dengan badan usaha, wilayah wisata dan proyek penguatan lainnya. Sebenarnya masih ada cara lain, melalui penciptaan lapangan kerja di sektor industri besar dan penting, yang jelas-jelas berada di luar cakupan kajian ini.

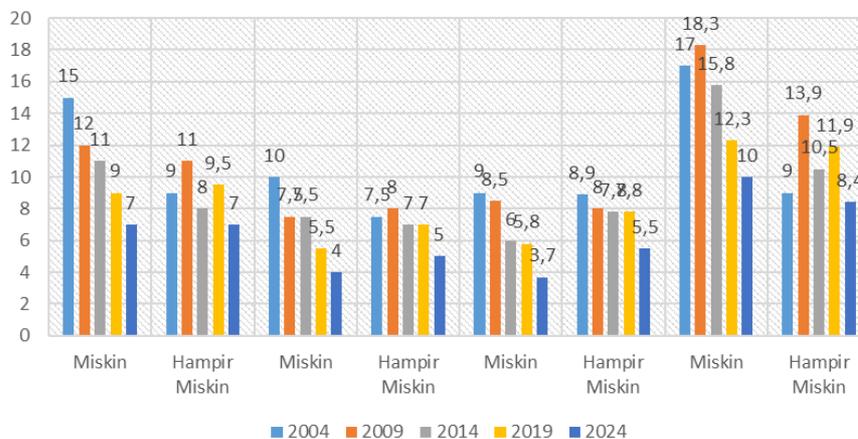
Oleh karena itu, penentuan jenis usaha di masyarakat, siklus usaha, jumlah modal perlu dilakukan guna menghilangkan pengaruh kesejahteraan dan kemiskinan.

Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan membuat pemerintah perlu bekerja sama membiayai biaya pembangunan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, partisipasi perusahaan dalam bentuk CSR merupakan salah satu sumber yang patut digali dan didorong, untuk diberikan kesempatan masuk ke dalam sistem tersebut. Kerja sama antar masyarakat sebagai gagasan besar wilayah dan hakikat bangsa Indonesia harus dijaga, dikelola dan dilindungi. Selain menjadi bagian dari budaya Pancasila, juga merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa. Salah satu indikator partisipasi aktif masyarakat pedesaan dalam pembangunan pedesaan adalah dengan adanya usaha sosial pedesaan (LKD). Lembaga kemasyarakatan pedesaan menurut undang-undang adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, karang taruna, PKK, RT dan RW.

Partisipasi masyarakat kurang mampu memegang peranan penting, termasuk sebagai cara warga menyampaikan kebutuhan dan keinginannya sehingga politik lokal dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan warga. Selain itu, penting juga untuk berpartisipasi dalam menjamin hak-hak warga negara dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga dapat memahami dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi juga dapat digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga negara mengenai isu-isu publik dan politik, sehingga partisipasi dapat menciptakan rasa kewarganegaraan yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi dan pembangunan bangsa. Dalam setiap pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi tidak hanya dalam bentuk pelaksanaan demokrasi saja, namun juga dalam bentuk hasil pembangunan yang tepat dan terbaik bagi masyarakat kurang mampu.

Partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan atau proyek yang dilakukan pada masyarakat setempat, disebut dengan partisipasi masyarakat. Peluang tersebut merupakan salah satu cara penguatan masyarakat (*community* pemberdayaan) dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, mulai dari tahap *input*, tahap proses, dan tahap produksi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pemberdayaan masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan kebijakan di daerah, diperlukan peningkatan keyakinan masyarakat terhadap manfaat partisipasi dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi risiko dalam proses kebijakan.

**Proporsi Hampir Miskin dan Penduduk Miskin**



Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional

Wilayah perkotaan, yang merupakan tempat tinggal sekitar 55% penduduk Indonesia, merupakan wilayah yang sensitif terhadap perubahan iklim dan risiko bencana (hotspot) serta umumnya memiliki tingkat keterpaparan dan kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Risiko iklim dan bencana diperkirakan akan meningkat karena banyak kota menghadapi kenaikan permukaan air laut dan peningkatan aktivitas manusia, yang menyebabkan terjadinya pulau panas perkotaan (urban heat island). Sekitar 7% penduduk kota ini adalah penduduk miskin, dan persentase yang hampir sama berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Masyarakat miskin dan rentan sering kali tinggal di permukiman kumuh dan informal dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas layanan dasar yang buruk. Mereka harus menghadapi guncangan dan tekanan akibat perubahan iklim, yang berdampak pada terbatasnya aset, mata pencaharian dan tabungan mereka, serta memaksa mereka untuk menerapkan strategi penanggulangan yang tidak tepat. Tanpa langkah-langkah ketahanan iklim yang mendukung masyarakat miskin, dampak-dampak ini kemungkinan besar akan meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan. Berbagai program pengentasan kemiskinan berupaya menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci. Namun, sebagian besar implementasinya terjebak dalam pendekatan kemitraan formal, dimana desain dan proses kerja dikembangkan di dalam komunitas, dan sebagian besar direncanakan dan dilaksanakan oleh pimpinan pihak eksternal.

Upaya yang dilakukan adalah fokus pada akar permasalahannya, yakni meningkatkan hasrat dan tenaga masyarakat. Masyarakat dieksplorasi dan didorong pengembangan serta dinamika kemampuannya, serta didorong untuk berminat, sadar dan meningkatkan kemampuannya. Pemberdayaan tidak hanya tumbuh seiring berkembangnya nilai tambah ekonomi, namun juga meningkatkan nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Hakikat pemberdayaan sosial adalah kemampuan memperkuat dan mengubah masyarakat dari segi nilai (ideologi), ekonomi dan budaya secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas (pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku), penguatan partisipasi dan tujuan, penguatan nilai-nilai budaya dan pranata sosial, memanfaatkan sumber daya lokal dan aktif membantu mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan nyata sekali, hal ini nampak dari manfaat serta kontribusi yang diberikan yaitu mampu membuka akses bagi usaha kecil dan para pengusaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan akses dari lembaga keuangan formal yang sudah ada, menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Perkembangan dan kemajuan kota yang terus memaksa masyarakat miskin harus hidup di pinggiran pesatnya perkembangan kota, banyaknya gelandangan dan pengemis, anak jalanan, agen koran, pedagang dan pedagang kaki lima. Jalan tersebut merupakan gambaran sempurna tentang kemiskinan ekstrem di kota tersebut. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu diatasi dan menjadi program pemerintah dan keikutsertaan kepedulian masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), KUBE dan UEP serta program-program untuk mengatasi permasalahan sosial lainnya telah mengarah pada upaya untuk mengatasinya. sudah teruji Banyak program yang diadakan. mempertimbangkan permasalahan sosial lainnya di lapangan, antara lain penanganan anak jalanan, pencegahan penyebaran, kekerasan terhadap perempuan atau pekerja perempuan, dan lain-lain. Karakteristik masyarakat miskin perkotaan dikelompokkan berdasarkan gaya hidup dan kualitas hidupnya, sehingga dapat dilihat dari berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, masyarakat, dan budaya.

Perkembangan otoritas lokal dan keberlanjutan proyek, tujuan utama model pemberdayaan sosial di perkotaan, harapannya adalah terciptanya rasa kebersamaan berdasarkan struktur sosial yang mengarah pada kekuatan sosial masyarakat dan programnya. Melalui partisipasi sosial masyarakat, terciptalah kekuatan masyarakat tanpa diiringi oleh pemerintah daerah dan dukungan masyarakat, kondisi yang mengarah pada model kekuasaan yang semakin meningkatkan kondisi perekonomian, hingga munculnya jenis pembangunan politik dalam masyarakat. suatu kelompok atau lembaga.

untuk jaminan Ini akan menjadi komunitas. Karena KUBE dan hasilnya akan merugikan seluruh pemilih, termasuk anggota kelompok KUBE itu sendiri, teman-teman dan lembaga pemilik proyek, yang tidak akan mampu meningkatkan pembangunan sosial melalui pemberian insentif atau bantuan adalah Masyarakat.

## CONCLUSION

Bantuan kepada masyarakat miskin merupakan upaya pengentasan kemiskinan karena penerima mempunyai usaha sebelum menerima bantuan dan tidak memenuhi kriteria rata-rata bantuan. Ini merupakan pekerjaan yang tidak memperhitungkan profesionalisme pekerjaannya. Untuk model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan terdapat 4 tahap pengembangan, yaitu tahap pengembangan potensi, tahap akumulasi sosial (potensi lapangan kerja), tahap partisipasi sosial dan tahap khusus. Aksi masyarakat sebagai kekuatan lokal dapat menciptakan model pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada prinsip ekologi dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Pemikirannya adalah penerapan model penguatan komunitas miskin lokal di perkotaan dapat mengubah sifat model pembangunan sosial, bukan mengembangkan masyarakat dari sektor ekonomi, namun harus dibarengi dengan pemahaman terhadap potensi masyarakat, potensi dan potensi yang dimiliki masyarakat semakin besar harapannya dan membangun masyarakat yang lebih baik.

## BIBLIOGRAPHY

- Adi. I. R. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Rev. ed. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi 2010-2035*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1276>.
- Blejwas. E. 2010. *Asset-based community development in Alabama's Black Belt. Seven strategies for building a diverse community movement*. Dalam Gary Paul Green & Ann Goetting Eds. *Mobilizing Communities. Asset Building as a Community Development Strategies*. Temple University Press.
- Slamet. Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Sumarnonugroho. 1991. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta. Hanindito.
- Afriza. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar. Budi. 2014. *Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Studi Tentang Efektifitas Bantuan Dana Bergulir Sektor Agribisnis*. Jurnal Kewirausahaan. Vol 13. No.1. Januari-Juni 2014.
- Dartanto. 2014. *Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan PNPM-MP dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Volume 2 Nomor 1. Juni.

- Fakih. Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial. Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Girsang. Wardis. 2009. *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Pulau Kecil di Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura. *Jurnal Agrikultura*. 20 3 .176-189.
- Hikmat. Harry. 2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial. Strategi Menuju Pembangunan Berpusat pada Rakyat People Centred Development*. Andalsos. Staf Ahli bidang Dampak Sosial Kemensos.